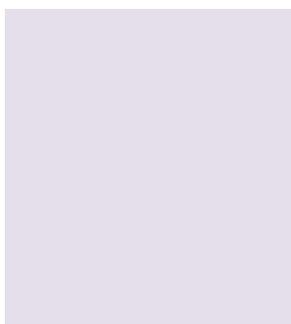
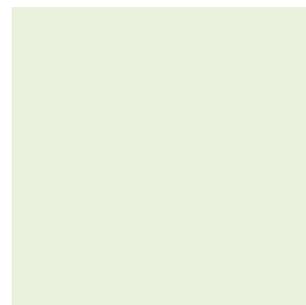
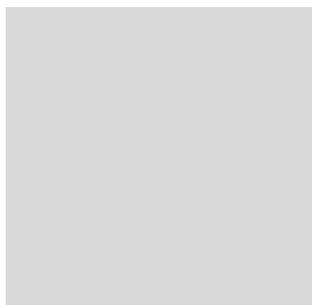


BAB

V

**VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN**



**RPJMD
KABUPATEN
PATI**

2017 - 2022

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 merupakan gambaran keadaan yang akan diwujudkan di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih 2017-2022 beserta arah tindakan yang dipersiapkan untuk mencapainya. Visi dan misi daerah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran sebagai gambaran keadaan yang akan dicapai. Selanjutnya visi dan misi diindikasikan melalui tolok ukur tertentu yang merepresentasikan capaian keberhasilan dampak pembangunan. Penyusunan tujuan dan sasaran ini merujuk pada RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III) dan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RTRW Kabupaten Pati 2010-2030. Visi misi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019 memiliki keterkaitan dengan visi misi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta Penyelarasan dengan RTRW. Keterkaitan tersebut dipaparkan dalam Lampiran V.1 dari dokumen ini.

5.1 Visi

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati-wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah:

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Penjelasan unsur visi Kabupaten Pati sebagai berikut.

1. Unsur visi "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat"

"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat", dimaksudkan sebagai implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur Pembangunan Kualitas Manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Kesejahteraan ekonomi direpresentasikan dengan tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kesejahteraan sosial merefleksikan kehadiran pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga ditandai oleh kemajuan kreativitas seni dan budaya masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari kondusivitas wilayah mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman

berarti juga kesiagaan perlindungan atas risiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Kesejahteraan masyarakat juga berarti kondisi hidup yang nyaman. Nyaman, berarti mengembangkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

2. Unsur Visi "Meningkatnya Pelayanan Publik"

"Meningkatnya Pelayanan Publik" juga memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 344). Kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima memerlukan kinerja aparatur, kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, hal tersebut juga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima membutuhkan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien.

Kemajuan sarana prasarana wilayah secara adil dan merata, dapat diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah, karena menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pati, termasuk wilayah perbatasan dengan kabupaten lain menjadi hal yang sangat mendesak demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terpenuhinya pemerataan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta kerawanan bencana agar tidak terjadi:

- a) Peningkatan intensitas cakupan banjir, longsor dan kekeringan;
- b) Penurunan KEHATI;
- c) Peningkatan kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
- d) Peningkatan alih fungsi lahan, sehingga pelayanan publik lebih optimal dan berkesinambungan.

Pemerataan dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terdistribusi secara maksimal dalam masyarakat. Pengertian merata berarti bahwa semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Jadi pelayanan publik mengandung unsur: (1) Pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, papan, pelayanan administrasi dan perizinan usaha, pelayanan umum lainnya); (2) Profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pemerintahan; (3) Implementasi teknologi Informasi; (4) Kemajuan sarana prasarana wilayah.

3. Implikasi visi daerah bagi pembangunan berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dibalik kebaikan visi Kabupaten Pati ini perlu diwaspadai eksekutif kontraproduktif bagi keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Eksekutif tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Aspek utama kesejahteraan dibidik dari kemampuan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek non ekonomi. Upaya peningkatan kesejahteraan membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan percepatan industrialisasi. Industrialisasi akan memerlukan aplikasi teknologi untuk mengeksplorasi alam dan pada gilirannya akan menimbulkan beberapa dampak negatif.

Penggunaan bahan-bahan kimia pada proses industri dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara. Akumulasi dampak negatifnya berpengaruh pada perubahan iklim, yang pada gilirannya berpengaruh pada keseimbangan ekosistem karena perubahan siklus alamiahnya. Perubahan iklim berdampak pada penurunan biodiversitas. Perubahan iklim banyak dirasakan eksekutif negatifnya pada produktivitas pekerjaan yang berdasar ekstraksi alam, seperti: pertanian, perikanan, dan peternakan.

Kesimpulannya, pelaksanaan RPJMD 2017-2022 dalam mengejar terwujudnya visi "Kesejahteraan Masyarakat" perlu dikendalikan dan dievaluasi untuk :

- a) mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem;
- b) mengurangi kerentanan bencana.

5.2 Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi dirumuskan untuk mendukung perwujudan unsur visi. Keterkaitan misi dan visi kabupaten Pati sebagai berikut.

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

a. Keterkaitan Dukungan Misi terhadap Visi

Delapan misi tersebut merupakan penjabaran visi yang keterkaitan dukungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1
Dukungan Misi dalam Pencapaian Unsur Visi

Unsur Visi	Misi	Penjelasan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Misi 3: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan penguatan kapasitas masyarakat untuk produktif, selain pendekatan jaring pengaman sosial pemenuhan kebutuhan dasar.
	Misi 5: Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.	Pertumbuhan usaha mikro di kabupaten, sebagai embrio pertumbuhan usaha kecil dan menengah diprioritaskan sebagai sarana penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, menguatkan daya beli masyarakat, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan bermuara pada stimulan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
	Misi 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Pertanian sebagai potensi unggulan Kabupaten Pati dijadikan fokus pengembangan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi hasil pertanian, perdagangan, dan industri. Fokus ini diharapkan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, menguatkan daya beli masyarakat, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan bermuara pada stimulan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan
	Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah	Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pilar kunci karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta daya saing daerah, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan daerah. Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan sistem perangkat keras penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi tolok ukur pembangunan yang bersifat <i>tangible</i> (kasat mata).
	Misi 8: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi mendatang. Perwujudannya diperlukan partisipasi masyarakat dan seluruh <i>stakeholders</i> untuk membudayakan kesadaran pentingnya gaya hidup ramah lingkungan.
Meningkatnya pelayanan publik	Misi 1: Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang berkualitas dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai modal dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran.
	Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan	Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat, serta masyarakat yang cerdas, berkualitas, mandiri, dan

Unsur Visi	Misi	Penjelasan
	pendidikan dan kesehatan	berdaya saing,
	Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan supaya responsif, dan akuntabel memberikan pelayanan publik yang humanis dan berkelanjutan.

b. Implikasi Misi Daerah bagi Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pilihan kebijakan berpotensi menimbulkan risiko negatif yang harus diperhatikan. Ditinjau dari kajian KLHS, ada beberapa hal yang perlu dikontrol dalam pelaksanaan pencapaian misi daerah tahun 2017-2022, supaya tidak merusak pembangunan berkelanjutan bagi kelestarian bumi dan kehidupan generasi mendatang.

Dari Misi 5, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati dengan cara pembukaan peluang investasi dan memperluas kesempatan kerja memiliki risiko terhadap perubahan iklim, penurunan biodiversitas, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah banjir, penurunan mutu dan kelimpahan SDA serta peningkatan alih fungsi lahan.

Dari misi 6, upaya peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan, dan industri memiliki risiko terhadap perubahan iklim, penurunan biodiversitas, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah banjir, penurunan mutu dan kelimpahan SDA, peningkatan alih fungsi lahan, risiko kesehatan dan keselamatan manusia.

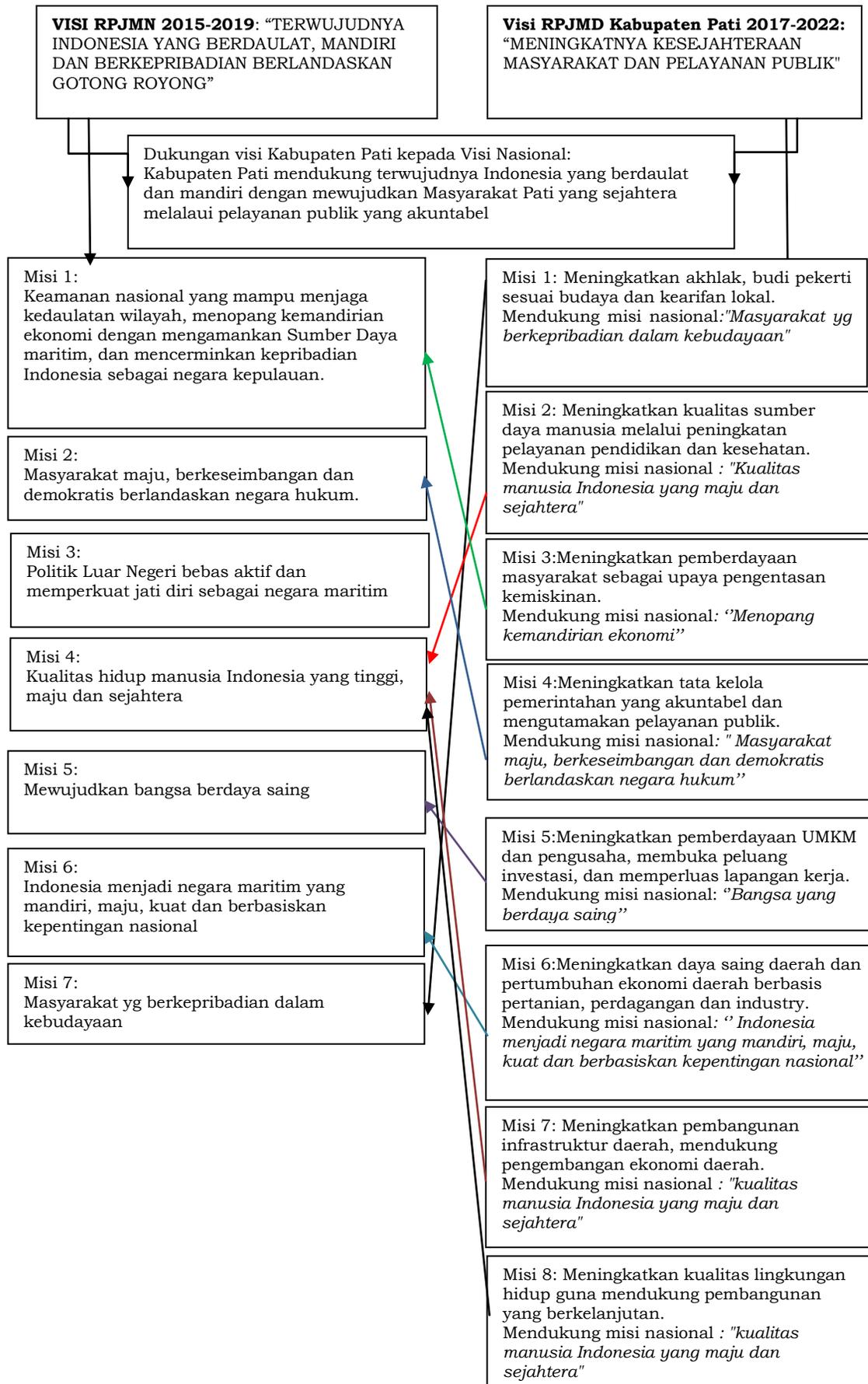
Dari misi 7, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung pencapaian visi peningkatan kesejahteraan namun juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan drainase, pembangunan gorong-gorong. Dampak negatif terhadap lingkungan misalnya terhadap perubahan iklim, penurunan biodiversitas, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah banjir, penurunan mutu dan kelimpahan SDA dan peningkatan alih fungsi lahan.

Kesimpulannya, pelaksanaan RPJMD 2017-2022 dalam menjalankan ke 8 (delapan) misi perlu dikendalikan dan dievaluasi untuk :

1. mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem
2. mengurangi kerentanan bencana

5.3 Keterkaitan Visi-Misi Kabupaten Pati 2017-2022 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjabaran visi misi Bupati Pati sebagai dasar perumusan sasaran hasil pembangunan daerah yang akan diwujudkan kurun 2017-2022. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis daerah didesain untuk mendukung pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati tahun 2005-2025, prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Keterkaitan visi misi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019 sebagai berikut :



Gambar 5.1 :
Keterkaitan Visi-Misi dengan RPJMD Kabupaten Pati

Tabel V.2
Keselarasan Antara Visi & Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018
Dengan Misi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Misi RPJMD Provinsi Jateng	Penerjemahan RPJMD Kab. Pati Tahun 2017-2021
Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI <i>"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"</i>	Visi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022: "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK", mendukung komponen visi RPJMD provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan unsur Sejahtera.
Misi 1: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan	Diterjemahkan dalam: 1. Misi 1, yaitu Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. 2. Misi 6, yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	Diterjemahkan dalam: 1. Misi 3, yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan 2. Misi 5, yaitu Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, <i>"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"</i>	Diterjemahkan dalam: Misi 4, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	Diterjemahkan dalam: Misi 1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Diterjemahkan dalam: Misi 3, yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Misi 6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	Diterjemahkan dalam: Misi 2, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Diterjemahkan dalam: Misi 7, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Tabel V.3
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025
Dengan Misi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Visi & MISI RPJPD Kab. Pati 2005 – 2025	Visi & MISI RPJMD Kab. Pati 2017 - 2022
Visi: PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK" Visi 2017-2022 mendukung komponen visi jangka panjang Kab. Pati dalam mewujudkan unsur Sejahtera.
Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya	Diterjemahkan dalam: 1. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, 2. Misi 1: Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
Misi 2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Diterjemahkan dalam: 1. Misi 5, yaitu Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja 2. Misi 6, yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. 3. Misi 8, yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Misi 3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Diterjemahkan melalui: Misi 4, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
Misi 4 Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan.	Diterjemahkan melalui: Misi 7, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Misi 5 Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.	Diterjemahkan melalui: Misi 5, yaitu Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
Misi 6 Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.	Diterjemahkan melalui: 1. Misi 1, yaitu Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, 2. Misi 5, yaitu Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 2010-2030, maka penerjemahan misi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4
Keselarasn Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2010-2030
dengan Misi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Kebijakan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
Pengembangan struktur ruang Daerah: Pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal	Diterjemahkan dalam: Misi 7, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Pengembangan pola ruang Daerah: a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya; c. kebijakan pengembangan kawasan strategis.	Diterjemahkan dalam: Misi 4, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
Penetapan kawasan strategis Daerah: Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau daya dukung lingkungan hidup.	Diterjemahkan dalam: 1. Misi 3, yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan; 2. Misi 5, yaitu Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja; 3. Misi 6, yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Misi 8, yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel V.5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Pati
Dengan Prioritas Nasional dan Program Unggulan
Provinsi Jawa Tengah

Prioritas RPJMN 2015-2019	Sasaran Pokok Prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022	Sasaran Pokok Prioritas RPJMD Prov. Jawa Tengah tahun 2013-2018
Agenda 1: Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.	Agenda 4: Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel (Tema kelompok program unggulan/janji kampanye dari misi 4 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
Agenda 2: Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Agenda 4: Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel (Tema kelompok program unggulan / janji kampanye dari misi 4 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.	Agenda 3: Pemberdayaan masyarakat (Tema kelompok program unggulan/janji kampanye dari misi 3 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	9. Pembangunan Infrastruktur; 4. Mewujudkan Desa Mandiri;
Agenda 4: Akan menolak negara	Agenda 4: Tata kelola pemerintahan dan	2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;

Prioritas RPJMN 2015-2019	Sasaran Pokok Prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022	Sasaran Pokok Prioritas RPJMD Prov. Jawa Tengah tahun 2013-2018
lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	elayanan publik yang akuntabel (Tema kelompok program unggulan/janji kampanye dari misi 4 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	
Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.	Agenda 2: Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan (Tema kelompok program unggulan/janji kampanye dari misi 2 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; 6. Rakyat Sehat; 7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah; 8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak; 10. Lingkungan Jawa Tengah <i>Ijo Royo-Royo</i> ;
Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	Agenda 3: Pemberdayaan masyarakat (Tema kelompok program unggulan / janji kampanye dari misi 3 Bupati Pati terpilih 2017-2022) Agenda 6: Penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah (Tema kelompok program unggulan / janji kampanye dari misi 6 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; 4. Mewujudkan Desa Mandiri;
Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Agenda 5: Investasi, UMKM dan perluasan penyerapan tenaga kerja (Tema kelompok program unggulan/janji kampanye dari misi 5 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; 4. Mewujudkan Desa Mandiri;
Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa.	Agenda 1: Pembangunan Karakter unggul masyarakat dan Pelestarian kekayaan budaya lokal (Tema kelompok program unggulan/janji kampanye dari misi 1 Bupati Pati terpilih 2017-2022)	1. Pendidikan Politik Masyarakat;
Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.	Agenda 1: Pembangunan Karakter unggul masyarakat dan Pelestarian kekayaan budaya lokal (Tema kelompok program unggulan dari misi 1/Janji kampanye Bupati Pati terpilih 2017-2022)	11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

5.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor: 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dilakukan pemeriksaan penyelarasan sasaran pembangunan daerah dengan RPJMN.

Tabel V.6
Harmonisasi Sasaran RPJMD Pati dengan Sasaran Pokok Nasional

Kode	Indikator Sasaran Pokok Nasional	Kode	Sasaran RPJMD Kab. Pati 2017-2022
1.1	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	2.2.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia
2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3.1.1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin
2.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.1.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2.2.	Pendidikan	2.1.2	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
2.3.	Kesehatan	2.1.1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2.4.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.2.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia
2.5.	Perlindungan Anak	2.2.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia
2.6.	Pembangunan Masyarakat	1.1.	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya
3.	Pembangunan Sektor Unggulan	6.1.1.	Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/ sektor pertanian, perdagangan dan industri
3.1.	Kedaulatan Pangan	6.1.4.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
3.5	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan konektivitas	7.1.1	Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan
3.5.27	Lingkungan : Emisi Gas Rumah Kaca	8.1.1.	Menurunnya kerusakan lingkungan
7.7.	Kesejahteraan Sosial	3.1.2	Menurunnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial
7.8.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.2.1.	Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan
8.5.	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	6.1.3.	Meningkatnya daya saing daerah
8.5.1	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB	5.1.2.	Meningkatnya produktivitas KUM
8.8.	Penguatan Investasi	6.1.2	Meningkatnya Investasi Daerah
8.11.	Tenaga Kerja	5.1.1.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
12.	Bidang Hukum dan aparatur	4.1.1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
15.10.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;	8.1.2	Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana
13.12.	Peningkatan Kemampuan Fiskal	4.1.2.	Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah

a. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran strategis daerah ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel V.7
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;														
	1.1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	39,07%	75%	1.1.1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Angka Penurunan Penyakit Masyarakat	14	12	11	9	7	6	5	Angka	SATPOL PP
Angka Kriminalitas yang Tertangani						1,69	1,65	1,63	1,60	1,57	1,54	1,51	Angka	SATPOL PP	
Persentase Penanganan Pelanggaran K3						56,72	57,58	65,00	68,00	75,00	77,00	87,00	Persen	SATPOL PP	
1.1.2. Meningkatkan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya					Tingkat Pelestarian Nilai Seni dan Budaya	52,98	38,12	61,66	67,61	73,73	78,48	85,00	Persen	Disdikbud	
2	Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan														
	2.1. Meningkatkan derajat kesehatan	IPM	69,03	73,00	2.1.1. Meningkatkan status kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,69	75,69	75,7	75,8	75,9	76	76	Usia	DKK

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan				dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu	115	85,88	83	80	78	75	73	Angka	DKK				
						Angka Kematian Bayi	10,84	8,75	8,55	8,30	8,15	8,00	7,80	Angka	DKK				
						Indeks Keluarga Sehat	0,22	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	Indeks	DKK				
						Persentase Keluarga Sejahtera	49	49,5	51	52,5	54	55	55	Persen	Dinsos				
					2.1.2.														
					Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	6,83	6,88	6,93	6,98	7,03	7,08	7,13	Tahun	Disdikbud				
						Angka Melek Huruf	91,08	93,01	94,27	95,63	96,71	97,50	98,67		Disdikbud				
Harapan Lama Sekolah	11,92	11,97	12,02	12,07		12,12	12,17	12,22	Tahun	Disdikbud									
					Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan	6,68	6,68	6,69	6,70	6,71	6,72	6,73	Persen	Dinarpusda					
2.2. Meningkatkan keadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	91,06	93	2.2.1. Meningkatkan kesetaraan	Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	0,87	0,88	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96	Rasio	Dinsos					

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	65.74	70	kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	Penurunan Kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan Perempuan	1,05	1,045	1,040	1,035	1,030	1,025	1,020	Rasio	Dinsos	
						Penurunan Kesenjangan Laki-laki dan Perempuan dalam Angkatan Kerja yang Terserap di Lapangan Kerja	1,05	1,044	1,035	1,030	1,025	1,020	1,015	Rasio	Dinsos	
3	Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan															
	3.1. Penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	11,65	9,51	3.1.1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,12	3,89	3,68	3,47	3,29	3,19	3,01	Persen	Disnaker	
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,05	68,20	68,40	68,60	68,75	68,85	69,00	Persen	Disnaker	
			Indeks Gini	0,34	0,29											
			PDRB Perkapita (Rp.)	27.134.604	41.073.749											
							Indek Desa Membangun (IDM)	0,604	0,604	0,614	0,624	0,664	0,684	0,685 – 0,700	Indeks	Dispermades

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Persentase rumah tangga terhadap akses air bersih	73,50	74,80	75,27	76,02	76,72	77,39	78,03	Persen	DPUTR	
						Persentase Kawasan Kumuh	0,935	0,888	0,799	0,711	0,622	0,533	0,444	Persen	Disperkim	
					3.1.2. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5,65	5,65	5,1	4,7	3,9	3,45	3,43	Persen	Dinsos	
4	Misi 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik															
	4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	60,87	65	4.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Indek Kepuasan Masyarakat	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,45	3,50	Nilai	Setda	
						Nilai LKJiP	51,13	53	60	62	64	66	68	Nilai	Setda	
						Persentase Kinerja Dewan yang Dipublikasikan	85	90	90	100	100	100	100	100	Persen	Setwan
						Persentase pengelolaan arsip pola baru	3,6	16,1	30,4	46,4	64,3	82,1	100	100	Persen	Arpusda
						Persentase Realisasi Capaian RPJMD	66,7	68,90	71,10	73,30	75,50	77,70	80,00	80,00	Persen	Bappeda

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan	77	80	81	82	83	84	85	Persen	Disdukcapil
						Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan catatan sipil	80	81	82	83	84	85	86	Persen	Disdukcapil
						Persentase Kajian yang ditindaklanjuti untuk Menjadi Kebijakan Daerah	25	33,33	35,00	37,50	38,50	40,00	42,25	Persen	Bappeda
						Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan Ruang	33,14	36,14	41,14	46,14	51,14	56,14	61,14	Persen	DPUTR
						Indeks Profesionalisme ASN A. Struktural B. Jabatan Fungsional	A=77,40	A=77,40	A=79	A=80	A=82	A=83	83,40	Indeks	BKPP
							B = 0	B=0	B=77,50	B=80	B=83	B=85	85		
						Opini WTP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini	BPKAD

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Persentase OPD yang Sudah Menerapkan E GOV/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	4	21,37	35,17	56,58	71,03	85,51	100	Persen	Kominfo
						Tingkat Maturitas SPIP	Level 2=2,315	Level 2=2,535	Level 3=3,218	Level 3=3,443	Level 3=3,593	Level 3=3,806	Level 4=4,027	Leveling	Inspektorat
						Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Leveling	Inspektorat				
					4.1.2. Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah	Proporsi PAD Terhadap APBD (PAD / APBD)	11,74	12,88	13,30	13,73	14,15	14,58	15,00	Persen	BPKAD
5	Misi 5 Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja														
	5.1. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan	Nilai PDRB ADHK (=000.000)	26.039.955,34	35.772.352,95	5.1.1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja	53,61	56,53	59,36	62,03	64,63	67,20	69,53	juta/orang	Disnaker

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	produktivitas daerah					Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	61,49	62	63	64	65	66	67	%	Disnaker
					5.1.2.										
					Meningkatnya produktivitas KUM	PertumbuhanUMK yang Aktif Berproduksi	56	11	12	12,5	13	13,5	14	%	Dinkop
						Persentase koperasi KSP/USP sehat	0	4	4,5	5	5,5	6	7	%	Dinkop
6	Misi 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.														
	6.1.				6.1.1.										
	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,60 – 6,00	Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/ sektor pertanian, perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Bidang Pertanian	3,71	3,72	3,72	3,73	3,74	3,74	3,75	Persen	Dinas Pertanian
		Inflasi daerah (%)	2,90	3 - 5		Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	5,04	4,4	4,8	5,2	5,6	5,8	6	Persen	Disdagperin
						Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri	4,64	4,66	4,6	4,87	5,2	5,4	5,9	Persen	Disdagperin
						NTP	102,76	102,75	102,90	102,95	103,00	103,05	103,10	Indeks	Dinas Pertanian
					6.1.2.										
					Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan investasi daerah	1,33	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9	2	Persen	DPMPSTP

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondi si 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondi si 2022	SATUAN	PD PENANGGU NG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					6.1.3.										
					Meningkatn ya daya saing daerah	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor pertanian	-1,29	-0,98	0,50	0,75	1,00	1,00	1,25	%	Dinas Pertanian
						Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri	4	4,5	5	5,5	6	7	8	Persen	Disdagperin
						Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	-29,51	193,1 9	2,53	3,31	3,49	4,08	5,43	persen	DKP
						Pertumbuhan kunjungan wisata	12	8	8	8	8	8	8	Persen	Dinporapar
						Pertumbuhan industri kreatif daerah	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	Persen	Disdagperin
					6.1.4.										
					Meningkatk an ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH	83	86,4	86,5	87	88	89	90	Angka	Dinas Ketapang
						Persentase daerah rawan pangan	20	18	16	14	13	12	11	Persen	Dinas Ketapang

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.														
	7.1.				7.1.1.										
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	60,66	78,59	Terpenuhi infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan	Kapasitas air baku daerah	79,46	80,60	81,75	83,88	85,07	86,26	88,37	%	DPUTR
						Daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik	79	80	81	83	84	85	87	%	DPUTR
						Persentase jalan kondisi baik	58	62	65	68	71	74	77	%	DPUTR
						Persentase jembatan kondisi baik	74	75	76	77	78	79	80	%	DPUTR
						Rasio tingkat pelayanan ruas jalan	0,31	0,31	0,305	0,300	0,295	0,290	0,285	Persen	DISHUB
8	Misi 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan														
	8.1.				8.1.1.										
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,13	69,01	Menurunnya kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Udara	101,67*	81,55**	82,00	83,00	85,00	90,00	95,00	Indeks	DLH

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi 2016	Kondisi 2022	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2022	SATUAN	PD PENANGGUNG JWB
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Indeks Kualitas Air	46,67	47,60	47,70	48,65	49,50	51,25	52,35	Indeks	DLH
						Indeks Tutupan Lahan	36,56	36,56	37,70	40,00	45,00	55,00	62,00	Indeks	DLH
	8.2. Menurunnya risiko bencana	Penurunan indeks risiko bencana	174	144	8.2.1. Meningkatkan kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Bencana	38	40	42	46	49	52	55	Persen	BPBD

Catatan: *) metode pengambilan sampel menggunakan metode infinger dengan durasi waktu pengukuran 2 jam;

***) metode pengambilan sampel menggunakan metode passive sampler dengan durasi waktu pengukuran 24 jam

b. Implikasi Tujuan dan Sasaran Daerah bagi Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, rangkaian tujuan dan sasaran pembangunan 2017-2022 yang dirumuskan mempunyai risiko negatif yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kehidupan layak bagi generasi mendatang.

Penjabaran sasaran dari misi 4, Kemandirian fiskal diupayakan melalui Peningkatan PAD. Upaya peningkatan PAD melalui kegiatan industri, pertanian, dan perdagangan jasa berisiko berdampak negatif terhadap penurunan mutu dan kelimpahan SDA, serta perubahan iklim.

Dari tujuan dan sasaran penjabaran misi 6, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah membutuhkan investasi dan peningkatan infrastruktur daerah. Apabila dalam peningkatan infrastruktur tersebut tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, yaitu berdampak negatif terhadap perubahan iklim, penurunan biodiversitas, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah banjir, penurunan mutu dan kelimpahan SDA dan peningkatan alih fungsi lahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran dari misi 7 mengandung risiko pada upaya Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas ketersediaan produk dan jasa. Dampak negatif yang ditimbulkan merambah terhadap perubahan iklim, penurunan biodiversitas, peningkatan intensitas dan cakupan wilayah banjir, penurunan mutu dan kelimpahan SDA dan peningkatan alih fungsi lahan.